

DESCRIPTION OF THE PROGRESS OF THE COMMUNITY BASED TOTAL SANITATION PROGRAM IN THE FIRST PILLAR IN THE PROVINCE OF NORTH SUMATRA IN 2021-2022

Author :

Yulia Khairina Ashar¹, Dewi Kartika², Desi Fitriani Harahap³, Khairuzikria Ramadhani⁴, Mia Afrianti Harahap⁵, Suhaila Adzhana Lbs⁶

E-mail:

yuliakhairinaa@uinsu.ac.id
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹

DOI :10.24903/kujkm.v8i1. 2065

Received : March 2023

Accepted : June 2023

Published : June 2023

P-ISSN: 2477-1880 E-ISSN: 2502-6623

Kesmas Uwigama : Jurnal Kesehatan Masyarakat

Abstract

Background: Community-Based Total Sanitation (CBTS) is an approach to change hygiene and sanitation behavior by triggering in the community. The STBM program emphasizes the community as the subject that is given stimulation. The first pillar in the STBM program is to stop open defecation (BABS)..

Purpose: describe and describe the progress of the Community-Based Total Sanitation program in the first pillar in the working area of the North Sumatra Provincial Health Office

Research Methods: This study uses a descriptive quantitative method with the Secondary Data Analysis approach.

Results: From STBM data (Community-Based Total Sanitation) in 2021-2022 with a total of 86.62% of household heads accessing sanitation facilities in 33 districts/cities in North Sumatra Province in 2021 from North Sumatra STBM data in triggering Stop Open defecation was 14.17% of the total achievements of 64.26% of villages/kelurahans that carried out STBM. From the STBM data for North Sumatra in 2022, 20.25% of the total achievements of 77.74% of Villages/Kelurahan conducting STBM will trigger Stop Open Opening.

Conclusion: Community-Based Total Sanitation in North Sumatra has been carried out and has progressed from the previous year, however, in the first pillar, Stop Open defecation has not met the desired standards, there are still many areas that practice open defecation. Factors that often occur due to knowledge, attitudes or habits and latrine ownership or socio-economic. Suggestions for the future, the government conducts periodic triggering and monitoring of areas with high rates of open defecation (open defecation).

Keywords: STBM; stop open defecation; and Progress

Abstrak

Latar Belakang: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan suatu pendekatan untuk mengubah perilaku hygiene dan sanitasi dengan melakukan pemicuan di komunitas. Program STBM ini ditekankan masyarakat sebagai subjek yang diberikan stimulasi. Pilar pertama dalam program STBM adalah stop buang air besar sembarangan (BABS).

Tujuan: Mendeskripsikan dan menggambarkan kemajuan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat pada pilar pertama di wilayah kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan Analisis Data Sekunder.

Hasil: Dari data STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) pada tahun 2021-2022 dengan jumlah total 86,62% Kepala Keluarga yang mengakses sarana sanitasi pada 33 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021 dari data STBM Sumatera Utara dalam melakukan pemicuan Stop BABS sebanyak 14,17% dari jumlah capaian 64,26 % Desa/Kelurahan yang melakukan STBM. Dari data STBM Sumatera Utara tahun 2022 dalam melakukan pemicuan Stop BABS sebanyak 20,25% dari jumlah capaian 77,74% Desa/Kelurahan yang melakukan STBM.

Kesimpulan: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Sumatera Utara sudah dilakukan dan mengalami kemajuan dari tahun sebelumnya, namun pada pilar pertama Stop BABS belum memenuhi standart yang diinginkan masih banyak ditemukan daerah yang melakukan Buang Air Besar Sembarangan. Faktor yang sering terjadi karena pengetahuan, sikap atau kebiasaan dan kepemilikan jamban atau sosial ekonomi. Saran untuk kedepannya pemerintah melakukan pemicuan serta pengawasan secara berkala kedaerah-daerah yang tinggi angka BABS (Buang Air Besar Sembarangan).

Kata kunci: STBM; Stop BABS; dan Kemajuan

Copyright Notice

This work is licensed under [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan berupaya meningkatkan derajat kesehatan melalui berbagai program dalam bidang kesehatan. Program kesehatan yang menjadi fokus kementerian kesehatan yaitu program kesehatan yang tercakup dalam program Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satu tujuan SDGs dalam bidang kesehatan terdapat pada point 6 yaitu menjamin ketersediaan dan pengolahan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang (Kemenkes RI, 2015). Tujuan program sanitasi total berbasis masyarakat menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendukung target SDG's (Sustainable Development Goals) atau pembangunan berkelanjutan yang ditargetkan akan dicapai pada tahun 2030 (Menteri Kesehatan RI, 2014).

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. STBM terdiri dari 5 pilar diantaranya yang pilar pertama Stop Buang Air Besar Sembarangan, pilar kedua Cuci Tangan Pakai Sabun, pilar ketiga Pengelolaan Air Minum/Makanan Rumah Tangga, pilar keempat Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan pilar kelima Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga. Program nasional STBM dikhususkan untuk skala rumah tangga, sehingga program ini adalah program yang berbasis masyarakat dan pemerintah tidak

memberikan subsidi sama sekali bagi rumah tangga. Untuk mencapai sanitasi total tahap awal yang dilakukan yaitu program Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dengan tujuan dari program Stop BABS ini adalah desa ODF (Open Defecation Free) merupakan kondisi suatu komunitas tidak buang air besar sembarangan (Raga Dista et al, 2018).

World Health Organization (WHO) tahun 2020, menghimpun data mengenai penduduk didunia yang masih gemar melakukan BAB sembarangan sebanyak 494 Juta orang didunia. Beberapa alasan dari mereka yang masih melakukan BAB sembarangan diantaranya kurangnya fasilitas toilet, tempat yang disediakan tidak aman atau nyaman, hingga yang tidak berkaitan dengan toilet seperti faktor pengetahuan dan lain sebagainya (WHO, 2020).

Sanitasi total mencakup suatu pandangan menyeluruh, menggunakan pendekatan "memicu" dipimpin oleh masyarakat untuk menghasilkan kebutuhan akan peningkatan sanitasi lingkungan (Kemenkes RI, 2014). Oleh karena itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam program yang dicanangkan agar program pembangunan kesehatan tersebut tercapai. Program pemerintah mengatasi permasalahan sanitasi tersebut adalah STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dengan judul "Penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1 Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS)

dengan Kejadian Penyakit Diare di Kelurahan Lakkang Kecamatan Tallo Kota Makassar”.

Keputusan program STBM dikeluarkan langsung oleh menteri kesehatan dalam surat keputusan no. 852/MENKES/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Di dalam surat keluaran Peraturan Kementerian Kesehatan (2014), STBM terdiri atas 5 pilar, yaitu stop buang air besar sembarangan (Stop BABS), cuci tangan pakai sabun (CTPS), Pengelolaan air minum dan makanan yang aman (PAMM-RT), pengelolaan sampah rumah tangga (PS-RT), dan pengelolaan limbah cair rumah tangga (PLC-RT).

Dari kelima pilar dalam program STBM tersebut, pilar pertama yaitu stop buang air besar sembarangan adalah pilar utama yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, karena masalah tersebut menyangkut masalah kesehatan lingkungan yang akan berdampak luas terhadap masyarakat disekitar. Selain itu, pilar pertama merupakan akses utama menuju sanitasi total.

Data terkini dari situs monitor Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang dimuat di laman Kementerian Kesehatan RI menunjukkan masih ada 8,6 juta rumah tangga yang anggota keluarganya masih mempraktikkan BABS per Januari 2020 (Kemenkes RI, 2020). Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS tahun 2018 yang telah diolah oleh Bappenas berdasarkan definisi SDGs 2030, Indonesia memiliki Persentase pelayanan sanitasi layak sebesar 74,58% termasuk di dalamnya sanitasi aman sebesar 7,42% (Bappenas, 2019). Angka tersebut diiringi dengan Tingginya persentase perilaku buang air besar Sembarangan (BABS) yaitu sekitar 9,36% atau setara dengan 25 juta jiwa

sehingga menjadikan Indonesia menduduki peringkat 3 dunia dengan Kasus BABS (Bappenas, 2019).

Permenkes No.3 Tahun 2014 Menyatakan bahwa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), yang dimaksud dengan STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan. Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sanitasi yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum, hingga meningkatnya jumlah kejadian Diare dan munculnya penyakit lainnya (Permenkes, 2014).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, Data sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan melalui sumber primer oleh penelitian sebelumnya Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat pada Pilar pertama yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.

Lokasi Penelitian

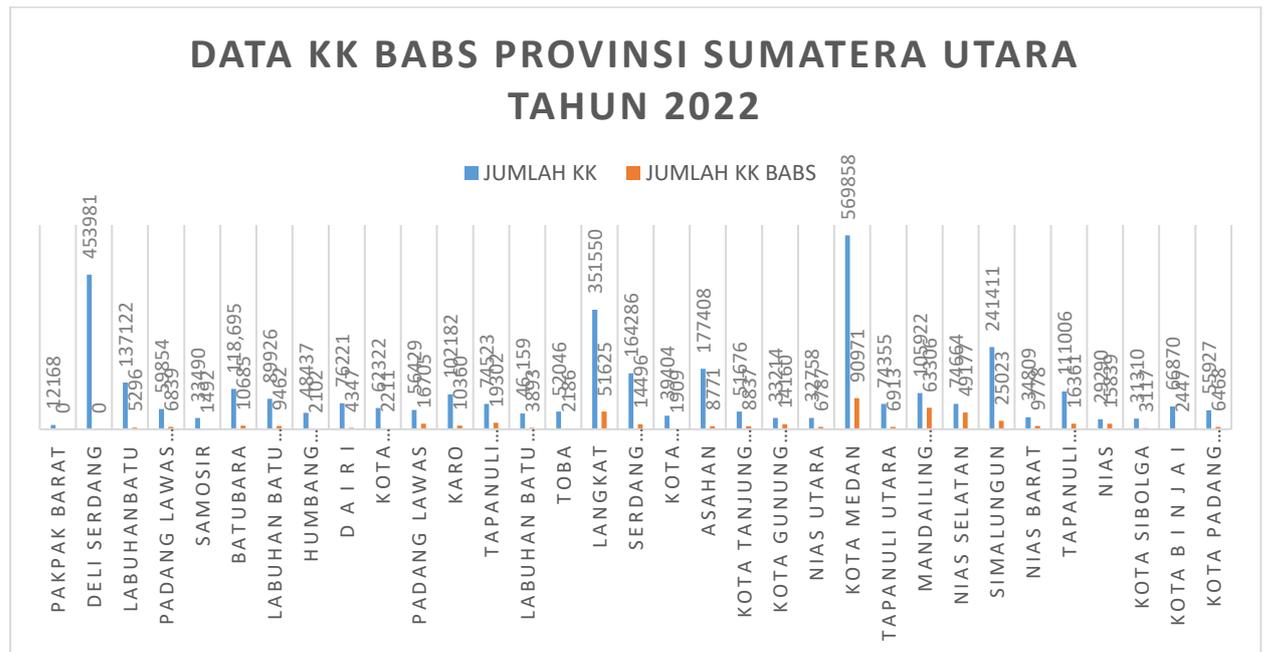
Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan

dan mudah bagi peneliti. Adapun sumber data dari Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumatera utara memiliki 33 Kabupaten/Kota dengan jumlah kartu keluarga 3.669.273, yang dimana masih banyak kabupaten yang masyarakatnya memiliki sikap BABS (buang air besar sembarangan).



(Gambar 1. Diagram batang data KK BABS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022)

Berdasarkan diagram batang diatas dapat kita lihat bahwa BABS terbanyak di Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 terdapat di 3 kabupaten yaitu yang pertama berada di kota Medan dengan jumlah kepala keluarga BABS sebanyak 90.971. Yang kedua di Kabupaten Mandailing Natal dengan jumlah kepala keluarga BABS sebanyak 63.306. Yang ketiga di Kabupaten Langkat dengan

jumlah kepala keluarga BABS sebanyak 51.625. Kemudian jumlah KK BABS paling sedikit berada di kabupaten Samosir yaitu sebanyak 1.492 KK. Sementara itu, kabupaten Pakpak Barat dan kabupaten Deli Serdang tidak memiliki jumlah KK BABS yang artinya kabupaten tersebut sudah dikatakan Stop BABS.

Tabel 1. Data Stop Buang Air Besar Sembarangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Dan 2022

NO	LOKASI/ KAB/ KOTA	Jumlah Desa/Kel	2021		2022		PROGRES/KEMAJUAN STOP BABS 2022
			Desa BABS (SBS)	Stop	Desa BABS (SBS)	Stop	
							Desa Stop BABS

							(SBS)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	PAKPAK BARAT	52	38	73,08	52	100,00	14	26,92
2	DELI SERDANG	394	288	73,10	394	100,00	106	26,90
3	LABUHANBATU	98	35	35,71	47	47,96	12	12,24
4	PADANG LAWAS UTARA	388	122	31,44	186	47,94	64	16,49
5	SAMOSIR	134	38	28,36	58	43,28	20	14,93
6	BATUBARA	151	45	29,80	58	38,41	13	8,61
7	LABUHAN BATU UTARA	90	23	25,56	29	32,22	6	6,67
8	HUMBANG HASUNDUTAN	154	39	25,32	47	30,52	8	5,19
9	D A I R I	169	33	19,53	39	23,08	6	3,55
10	KOTA PEMATANG SIANTAR	53	9	16,98	11	20,75	2	3,77
11	PADANG LAWAS	304	16	5,26	60	19,74	44	14,47
12	KARO	269	52	19,33	52	19,33	0	0,00
13	TAPANULI SELATAN	248	19	7,66	34	13,71	15	6,05
14	LABUHAN BATU SELATAN	54	7	12,96	7	12,96	0	0,00
15	TOBA	244	18	7,38	27	11,07	9	3,69
16	LANGKAT	277	28	10,11	28	10,11	0	0,00
17	SERDANG BEDAGAI	243	6	2,47	24	9,88	18	7,41
18	KOTA TEBINGTINGGI	35	1	2,86	3	8,57	2	5,71
19	ASAHAN	204	8	3,92	15	7,35	7	3,43
20	KOTA TANJUNG BALAI	31	1	3,23	2	6,45	1	3,23

21	KOTA GUNUNG SITOLI	101	0	0,00	6	5,94	6	5,94
22	NIAS UTARA	113	1	0,88	6	5,31	5	4,42
23	KOTA MEDAN	151	0	0,00	6	3,97	6	3,97
24	TAPANULI UTARA	252	4	1,59	10	3,97	6	2,38
25	MANDAILING NATAL	407	14	3,44	14	3,44	0	0,00
26	NIAS SELATAN	461	12	2,60	12	2,60	0	0,00
27	SIMALUNGUN	413	6	1,45	8	1,94	2	0,48
28	NIAS BARAT	105	1	0,95	1	0,95	0	0,00
29	TAPANULI TENGAH	215	2	0,93	2	0,93	0	0,00
30	NIAS	170	0	0,00	0	0,00	0	0,00
31	KOTA PADANG SIDEMPUNAN	79	0	0,00	0	0,00	0	0,00
32	KOTA BINJAI	37	0	0,00	0	0,00	0	0,00
33	KOTA SIBOLGA	17	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2022 dapat dikatakan beberapa Kabupaten/Kota mengalami peningkatan desa Stop BABS. Seperti Kabupaten Pakpak Barat yang memiliki jumlah total 52 desa, kabupaten tersebut mengalami peningkatan sebanyak 14 desa Stop BABS, dari tahun 2021 hanya 38 desa yang melakukan Stop BABS sehingga pada tahun 2022 menjadi 52 desa yang sudah melakukan Stop BABS yang dimana artinya kabupaten Pakpak Barat pada tahun 2022 dapat dikatakan kabupaten yang sudah Stop BABS. Sementara itu, Kabupaten Deli Serdang memiliki jumlah total 394 desa yang pada tahun 2021 sebanyak 288 desa yang melakukan Stop BABS hingga tahun

2022 mengalami peningkatan sebanyak 106 desa yang melakukan Stop BABS sehingga jumlah desa yang melakukan Stop BABS pada tahun 2022 sebanyak 394 desa yang dimana artinya Kabupaten Deli Serdang dapat dikatakan Kabupaten yang sudah Stop BABS.

Adapun Kabupaten/Kota yang tidak mengalami kemajuan pada kasus Stop BABS tahun 2022 sebanyak 11 Kabupaten/kota yaitu Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias, Kota Padang Sidempun, Kota Binjai, dan Kota Sibolga.

KESIMPULAN

Sumatera utara memiliki 33 Kabupaten/Kota dengan jumlah kartu keluarga 3.669.273, yang dimana masih banyak kabupaten yang masyarakatnya memiliki sikap BABS (buang air besar sembarangan). Di Sumatera Utara terdapat 3 kabupaten/kota tertinggi Buang air besar sembarangan di antaranya yaitu: pertama kota medan, kabupaten mandailing natal dan kabupaten langkat,

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Sumatera Utara sudah dilakukan dan mengalami kemajuan dari tahun sebelumnya, namun pada pilar pertama Stop BABS belum memenuhi standart yang diinginkan masih banyak ditemukan daerah yang melakukan Buang Air Besar Sembarangan. Faktor yang sering terjadi karena pengetahuan, sikap atau kebiasaan dan kepemilikan jamban atau sosial ekonomi.

SARAN

Diharapkan untuk kedepannya pemerintah melakukan pemicuan serta pengawasan secara berkala kedaerah-daerah yang tinggi angka BABS (Buang Air Besar Sembarangan) dan juga untuk masyarakat bisa menyadari dampak akan buang air besar sembarangan sehingga mencari cara agar kita tidak buang air besar sembarangan seperti membuat cubluk atau yang lainnya

Referensi:

Azzarrah, I. J., & Kurniawan, B. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DI JAWA TIMUR. *Publika*, 573-586.

Hasditama, R. R. IMPLEMENTASI LIMA PILAR SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) DI WILAYAH KAMPUNG SANITASI KELURAHAN RAWA MEKAR JAYA KOTA

TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta-FIKES).

Hasibuan, R., Susilawati, S., & Nanda, M. (2021). Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar BABS Di Kota Sibolga. *Shihatuna: Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat*, 1(1), 1-7.

Herniwanti, H., Sudarto, E., & Ardiana, A. (2022). Penyuluhan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 1–Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Kecamatan Bengkalis, Riau. *Jurnal Abdidas*, 3(3), 465-473.

Kemenkes RI. (2015). Kesehatan dalam kerangka sustainable development goals (SDGs). Jakarta.

Menteri Kesehatan RI. (2014). Peraturan menteri kesehatan RI nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi total berbasis masyarakat. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Siahaan, P. A. S. (2022). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Buang Air Besar Sembarangan Di Kelurahan Guntung Saga (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

WILAN, P. (2021). KOMUNIKASI DALAM PROGRAM SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) UNTUK MEWUJUDKAN KESEHATAN MASYARAKAT (Study Kasus di Kelurahan Sidowaluyo) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).